

**ANALISIS YURIDIS TENTANG HARTA TIRKAH (HARTA
PENINGGALAN) DITINJAU DARI SISTEM HUKUM
KEWARISAN ISLAM
(STUDI PUTUSAN MA RI NO. 633 K/Ag/2013)**

NIEKO INDHARWAN IRWAN

ABSTRACT

A conflict often occurs between the parties who feel settled down peacefully and amicably. However, often this conflict cannot be settled down in such away and it should be settled down in the court. One of the conflicts which, in the end should be settled down in the court is the case in which a verdict has been handed down by the Judge of The Supreme Court of the Republic of Indonesia No.633 K/Ag/2013. In relief sought, the plaintiff principally begs the panel of judges to decide the land in disputes as the tirkah of the late and to declare that the bequest deed is void, to assign the plaintiff as the only heir and the shares of tirkah is conducted based on the Islamic inheritance law, adn to give the heir's shares to the defendants, co-defendant I and co-defendant II as wasiatun wajibah. Based on the results of the analysis, it was found that the inheritance could be separated from the tirkah by firstly fulfilling the heir's duties as regulated in the Article 175 of KHI. The solution for the tirkah sharing is that it should be started from fulfilling the heirs duties in form of the deceased's tajhiysh, paying off his debts, returning one's things that were left for safe keeping to the testator and carrying out his last will and testaments. The judge's legal consideration in the verdict of the Supreme Court of The Republic of Indonesia No.633 K/Ag/2013 was not relevant to the Islamic inheritance law.

Keywords: *Tirkah, Islamic Inheritance Law, the Only Heir*

I. Pendahuluan

Sengketa waris yang terjadi akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak jarang pula sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut dan penyelesaiannya harus ditempuh melalui proses pengadilan. Salah satu sengketa waris yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses pengadilan terdapat dalam perkara yang telah diputus oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.633 K/Ag/2013. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan tanah Alm sebagai harta waris/barang sengketa dalam perkara ini. Penggugat dalam dalilnya, menganggap hibah yang dilakukan Alm mengakibatkan Penggugat dirugikan sebagai ahli waris dan terpaksa menguasai

harta yang dihibahkan ke Turut Tergugat II, karena Penggugat diusir oleh Tergugat saat menempati harta waris (barang sengketa).

Dalam petitum, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan tanah sebagaimana diuraikan di atas sebagai harta *tirkah* (harta peninggalan) Alm dan menyatakan akta hibah tidak berkekuatan hukum, penetapan Penggugat sebagai ahli waris tunggal, pembagian harta *tirkah* (harta peninggalan) tersebut secara hukum kewarisan Islam, serta memohon agar pengadilan memberi bagian waris kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan II sebagai *wasiatun wajibah*.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemisahan harta warisan dari harta *tirkah* (harta peninggalan) pewaris ?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta *tirkah* (harta peninggalan) menurut hukum kewarisan Islam ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.633 K/Ag/2013 ?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemisahan harta warisan dari harta *tirkah* (harta peninggalan) pewaris.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta *tirkah* (harta peninggalan) menurut hukum kewarisan Islam.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.633 K/Ag/2013.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan metode pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung RI No.633 K/Ag/2013, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.85/Pdt.G/2013/PTA-Sby, Putusan Peradilan Agama Jombang No.257/Pdt.G/2012/PA.Jbg, Kompilasi Hukum Islam, UU No.50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, KUHPerdara.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi.¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder². Bahan hukum *tertier* yang digunakan dalam penelitian berupa Alquran, kamus hukum serta majalah terkait penelitian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum kewarisan memuat sejumlah ketentuan tentang kewarisan, dimana salah satunya mengatur tentang pemisahan harta waris dari harta *tirkah* atau bagian harta *tirkah* (harta peninggalan) yang menjadi bagian waris bagi ahli waris. *Faraidh* telah diatur secara jelas di dalam Qur'an yang merupakan sumber hukum tertinggi. Ketentuan tentang bagian-bagian yang merupakan hak waris diatur dalam Surat An-Nisa 4 Ayat 7, 11, 12, 33, 176 dan surat lainnya. Ayat-ayat Al Quran tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta *tirkah*.³

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Praditya Paramitha, 2005), hal.141

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.31

³Eman Suparman, *Op.Cit.*, hal.11

Bagian waris berdasarkan ketentuan Qur'an dapat diketahui dari uraian surat An-Nisa berikut ini :

1. Surat An-Nisa 4 Ayat 7 : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2. Surat An-Nisa 4 Ayat 11 : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3. Surat An-Nisa 4 Ayat 12 : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui.

4. Surat An-Nisa 4 Ayat 33 : Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang dihasilkan ibu bapak dan kerabat karibnya kami jadikan pewaris-pewarisnya dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
5. Surat An-Nisa 4 Ayat 176 : Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudara-saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) dan jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan.

Alasan pemisahan bagian harta warisan dari harta *tirkah* juga tidak terlepas dari pandangan Islam terhadap hakikat dan fungsi harta dalam kehidupan umat Islam. Pada hakikatnya, Allah merupakan pemilik mutlak harta yang kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah: 29, yaitu : “Dialah (Allah) yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi buat kalian semuanya”

Dalam kaitannya dengan pandangan Islam terhadap harta, maka alasan pemisahan harta waris dari harta *tirkah* dilatarbelakangi oleh hakekat kepemilikan harta oleh umat Islam. Kepemilikan harta dalam pandangan Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, perekat hubungan persaudaraan dimana kepemilikan harta tidak merupakan masalah, sepanjang kepemilikan tersebut tidak diperoleh dengan berbuat dosa. Pemisahan harta warisan dari harta *tirkah* (harta peninggalan) dilakukan agar setiap orang memperoleh bagian atau

haknya masing-masing, baik itu merupakan hak waris para ahli waris maupun hak-hak penerima wasiat dan orang yang berpiutang dengan pewaris.

Penentuan bagian hak waris dilakukan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta *tirkah* (harta peninggalan) tersebut, sebab pewaris semasa hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu wasiat (pesan) dan sebagainya.⁴

Hak yang berhubungan dengan harta *tirkah* (harta peninggalan) tersebut adalah⁵ :

1. Hak yang menyangkut kepentingan mayit (pewaris) sendiri yaitu biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dengan dimakamkan.
2. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.
3. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
4. Hak ahli waris.

Biaya penyelenggaraan jenazah dapat diperhitungkan dari harta *tirkah* dengan syarat tidak dilebihkan dari yang seharusnya dan dalam batas yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Apabila biaya tersebut dilebihkan karena desakan tradisi, maka tidak dibiayai dengan harta *tirkah*.⁶ Dalam keadaan pewaris mempunyai hutang semasa hidupnya, maka dapat diperhitungkan dari harta *tirkah* (harta peninggalan) dan apabila jumlah hutang melebihi jumlah harta *tirkah*, maka pembayarannya dicukupkan dengan harta *tirkah* yang ada saja. Dalam hal terdapat dua kreditur, maka kepada kreditur dibayarkan sesuai dengan perbandingan besar kecilnya hutang pewaris.⁷ Harta *tirkah* bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang tidak bergerak karena harta *tirkah* (harta peninggalan) juga dapat berupa utang ahli waris. Ahli waris tidak dibenarkan untuk membagikan harta waris sebelum membayarkan utang si mayat.⁸

Adapun yang menjadi kewajiban ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 175 KHI, adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

⁴M.Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, hal.19

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Sulaiman Rasyid, *Ilmu Fara'idh*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), hal.346

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

Berdasarkan Pasal 175 KHI tersebut, ahli waris memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pewaris. Ahli waris tidak memiliki kewajiban menutupi kelebihan jumlah utang pewaris yang melebihi jumlah harta *tirkah* dengan harta ahli waris tersebut dan apabila ahli waris meyanggupi untuk menutup kekurangan tersebut, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu kebaikan dan bukan merupakan suatu kewajiban hukum.⁹

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah lalai mencermati rukun kewarisan dan sengketa perkara merupakan sengketa harta warisan dan hibah Alm. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan ahli waris tunggal Pewaris dan dalam amar putusan menetapkan barang sengketa (A1, A2, A3, B1 dan B2) setelah dikurangi 1.400 M² tanah yang dihibahkan kepada Siswoyo sebagai bagian harta *tirkah* (harta peninggalan) Penggugat.

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim tersebut, dimulai dengan menganalisis terlebih dahulu peristiwa *a quo* yang terjadi dalam perkara untuk kemudian dikonstatir dengan peristiwa hukum waris maupun hibah. Pertimbangan hakim tersebut dinilai telah tepat, hanya ada pokok perkara hanya berupa waris dan hibah, sedangkan peristiwa wasiat *wajibah* yang didalilkan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam *Fiqih* Islam, wasiat *wajibah* didasarkan pada suatu pemikiran bahwa di satu sisi wasiat *wajibah* dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan

⁹M.Hasballah Thaib, *Op.Cit.*, hal.20

kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*.¹⁰

KHI yang mengatur tentang wasiat *wajibah* terdapat dalam Pasal 209. Adapun isi Pasal 209 KHI yaitu :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya. (Ayat 1)
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. (Ayat 2)

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak menerima wasiat *wajibah* adalah anak angkat dan orangtua angkat, dimana besarnya wasiat *wajibah* dibatasi sampai dengan 1/3 bagian harta peninggalan pewaris.

Dalam petitum Penggugat/Pemohon Kasasi pada perkara *a quo* memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan maksimal 1/3 bagian harta *tirkah* (harta peninggalan) kepada Turut Tergugat 2. Penolakan terhadap permohonan tersebut oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dinilai telah tepat. Wasiat *wajibah* tidak diberikan kepada cucu angkat, tetapi kepada anak angkat, sehingga permohonan tersebut harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Ayat 1 KHI.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, waris dalam hukum kewarisan Islam memiliki beberapa syarat atau rukun waris, yaitu kematian pewaris, ahli waris yang hidup pada saat pewaris meninggal, hak waris maupun tidak adanya halangan waris. Salah satu syarat waris adalah kematian pewaris.

Kematian Pewaris dalam posita surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa benar Alm telah meninggal dunia pada tahun 1992. Pembuktian dalil tersebut dilakukan Penggugat dengan mengajukan bukti asli surat kematian (P2). Bukti P2 telah mempunyai kekuatan pembuktian karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 2, laporan kematian seseorang berupa Register Akta Kematian dan

¹⁰Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal.1024

Kutipan Akta Kematian yang dicatat dan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Dalil Penggugat juga diperkuat oleh kesaksian V dan W yang bersaksi bahwa Alm telah meninggal dunia. Dari pembuktian tersebut dapat diketahui bahwa syarat kematian pewaris telah memenuhi syarat waris. Ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal merupakan syarat kedua dalam waris. Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai syarat kedua tersebut, terlebih dahulu diuraikan tentang kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris tunggal, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim. Untuk mengetahui bahwa pertimbangan hakim tersebut telah tepat, maka perlu diketahui terlebih dahulu kebenaran secara hukum bahwa Penggugat merupakan anak laki-laki kandung Alm satu-satunya, kedudukan masing-masing pihak terkait dalam perkara *a quo* serta ada tidaknya halangan waris Penggugat.

Salah satu syarat atau sebab seseorang menjadi ahli waris (*al waarits*) yaitu adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) dengan pewaris. Salah satu ahli waris yang merupakan ahli waris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) adalah anak laki-laki. Dalam posita, Penggugat/Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak tunggal kandung dari Alm. Dalil tersebut diperkuat dengan Surat Kartu Keluarga Alm. Soehardjo (P.VI), kesaksian X, Y maupun sumpah Penggugat sendiri. Keempat bukti tersebut saling menguatkan satu sama lain dan telah mempunyai nilai pembuktian, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut, maka dalil Penggugat merupakan anak laki-laki kandung Alm. Soehardjo sudah tepat dan benar.

Kedudukan anak laki-laki tanpa diselingi perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai *ashabah*, lebih khususnya anak laki-laki merupakan *ashabah binnafsih*. Alquran tidak membatasi bagian waris anak laki-laki, sehingga anak laki-laki sebagai *ashabah binnafsih* berhak untuk mewarisi seluruh harta *tirkah* (harta peninggalan). Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai anak kandung laki-laki tunggal Alm. Soehardjo tidak secara otomatis menjadi ahli waris tunggal. Untuk mengetahui hal tersebut, maka harus dinilai perlu untuk terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap kedudukan beberapa pihak yang terkait dengan perkara *a quo*.

1. B (Janda Alm)

Janda merupakan salah satu ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Janda merupakan salah satu ahli waris yang tergolong dalam *aschabul furudh* (*ashabal-furudh*) khususnya *aschabul furudh is-sababiyah*, dimana bagian waris janda sudah ditentukan dalam Alquran. Janda memperoleh 1/8 bagian dari harta *tirkah* (harta peninggalan), jika pewaris mempunyai anak atau 1/4 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Untuk mengetahui bahwa Musriah berhak atau tidak sebagai ahli waris Alm, perlu dianalisis kebenaran pernikahan Alm semasa hidup dengan B. Asli Surat Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Kenaiban Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, Nomor 238, tanggal 16 April 1940, (P.1 dan T.1). Bukti P.1 dan T.1 telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 KHI, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bukti P.1 dan T.1 tersebut telah mempunyai nilai pembuktian, sehingga dalil Penggugat tentang Musriah merupakan janda Alm adalah tepat dan benar.

Janda merupakan salah satu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam Alquran. B merupakan janda Alm akan tetapi, B tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris karena B telah meninggal dunia pada tahun 2006 atau sebelum pemeriksaan perkara *a quo* tahun 2012.

2. U

Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi dalam pokok perkara mendalilkan bahwa U juga merupakan ahli waris karena hubungan perkawinannya dengan Alm. U merupakan istri dari perkawinan kedua Alm semasa hidupnya yang melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Z dan XY. Dalil Tergugat/ Termohon Kasasi bahwa U merupakan istri dari perkawinan ke 2 (dua) Alm dibuktikan Tergugat hanya dengan kesaksian W. Pembuktian perkawinan hanya berdasarkan kesaksian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 KHI yang mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dalil Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan. Akibat hukum dalil Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak dapat dibuktikan tersebut, mengakibatkan U, Z dan XY tidak mempunyai hak waris atas harta *tirkah* (harta peninggalan) Alm.

3. T (Tergugat/ Termohon Kasasi)

Dalam eksepsi, Tergugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi merupakan anak Alm dan bernama T. Dalam replik, Penggugat/Pemohon Kasasi membantah dalil tersebut dengan tegas bahwa Tergugat/Termohon Kasasi bernama T bukan merupakan anak Alm, melainkan cucu Alm/ anak S yang merupakan saudara kandung Alm. Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang menerangkan tentang T adalah anak dari hasil pernikahan Alm dengan U (T.3), kesaksian W serta kesaksian V. Berdasarkan bukti tersebut, hakim perkara *a quo*, menilai bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan diri sebagai anak Alm, sehingga telah memenuhi batas-batas minimal nilai pembuktian dan telah memiliki kekuatan pembuktian. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah mempunyai kekuatan yang seimbang dengan pembuktian yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap Kelahiran Wajib Dilaporkan oleh Penduduk Kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan ayat 2 dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian kelahiran seseorang dilakukan dengan mengajukan bukti berupa Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pertimbangan majelis hakim yang menilai bahwa bukti T.3 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sepanyul Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang mempunyai kekuatan pembuktian yang membenarkan bahwa Tergugat merupakan anak dari Alm dinilai tidak tepat secara hukum dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Tergugat tersebut. Tergugat terbukti tidak dapat mengajukan bukti berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Hal tersebut juga menyebabkan kekuatan pembuktian antara

Penggugat/Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan kekuatan pembuktian yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi.

Berdasarkan penelitian, tidak ada satupun pasal dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 yang mengatur kewenangan Hakim Peradilan Agama untuk mengabulkan permohonan sumpah Penggugat untuk membenarkan bahwa Penggugat merupakan anak tunggal Alm. Demikian pula jika berpedoman pada ketentuan HIR sebagai sumber Hukum Acara Perdata yang bersifat umum (*lex generalis*). Pasal 164 HIR mengatur bahwa sumpah merupakan salah satu alat bukti di persidangan. Ketentuan tentang sumpah sebagai alat bukti, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1829 KUH Perdata.

Pasal 1829 KUH Perdata mengatur bahwa terdapat dua macam sumpah di muka Hakim, yaitu :

- a. Sumpah pemutus, yaitu sumpah yang diperintahkan untuk dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lawan untuk menunda pemutusan perkara. (Ayat 1)
- b. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya. (Ayat 2)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sumpah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dirinya sendiri dan kemudian diizinkan (bukan diperintahkan) oleh Majelis Hakim berdasarkan permohonan tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1829 KUH Perdata. Sumpah yang diizinkan tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Di samping pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi, Hakim juga mendengar sendiri keterangan YZ yang berkediaman disamping salah satu rumah yang menjadi objek sengketa, keterangan mana disampaikan dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa T adalah anak kandungnya S yang merupakan saudara Alm dan dipelihara oleh Alm sejak kecil. Keterangan YZ tersebut juga saling menguatkan dengan keterangan saksi Penggugat N.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tergugat/Termohon Kasasi, secara hukum bukan merupakan anak kandung dari Alm dari hasil perkawinan dengan U. Hasil analisis tersebut diperkuat pula dengan hasil analisis terhadap U yang tidak

terbukti secara hukum merupakan istri kedua yang sah Alm. Tergugat/Termohon Kasasi bukan merupakan anak kandung dari Alm, sehingga Tergugat/Termohon Kasasi bukan merupakan ahli waris Alm.

4. N dan M

Dalam posita gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, dijelaskan bahwa M merupakan cucu perempuan Alm dan N merupakan cucu laki-laki. Kedua cucu Alm merupakan anak dari Penggugat. M dan N adalah benar merupakan cucu perempuan dan cucu laki-laki Alm berdasarkan fakta persidangan berupa tidak adanya bantahan Tergugat/Termohon Kasasi serta keterangan saksi X.

Cucu laki-laki dan cucu perempuan berkedudukan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, secara khusus merupakan ahli waris yang tergolong pada ahli waris pengganti. Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika :

- a. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya
- b. Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka jika :

- a. Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya
- b. Ada cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris akan terbuka jika tidak ada anak laki-laki pewaris, sehingga dapat diketahui bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki pewaris. Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan paman (anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibi (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bilghair*. Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka bagian anak laki-laki pewaris diterima secara bersama-sama.

Jika dibandingkan dengan kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan Alm. Soehardjo, maka dapat diketahui bahwa M dan N merupakan ahli waris yang terhalang semua hak warisnya (*hijab hirman*) oleh keberadaan Penggugat/

Pemohon Kasasi (anak laki-laki Alm). Kedudukan M dan N merupakan ahli waris pengganti ayahnya (P/Penggugat) hanya apabila Penggugat telah meninggal dunia saat pembagian waris dilakukan.

Berdasarkan uraian tentang kedudukan beberapa pihak yang terkait dalam perkara *a quo* tersebut di atas menunjukkan penetapan Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya anak laki-laki kandung Alm dan juga merupakan ahli waris tunggal Alm sudah tepat, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pandangan antara pertimbangan hukum hasil penelitian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Perbedaan tersebut terletak pada pertimbangan hakim yang menetapkan N dan M sebagai cucu dari ahli waris menjadi anak angkat pewaris. Penetapan tersebut dinilai tidak tepat, karena N dan M merupakan ahli waris Almarhum dan berhak mendapatkan bagian harta *tirkah*, seandainya P yang merupakan orangtua N dan M telah meninggal.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, ditetapkan bahwa harta warisan pewaris yang menjadimilik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris tunggal adalah barang sengketa setelah dikurangi hibah sawah Alm kepada T (Tergugat) seluas 1.400 M². Hibah sawah Alm kepada T (Tergugat) seluas 1.400 M² adalah sah karena tidak melebihi 1/3 harta Pewaris. Hibah sawah kepada N berupa sawah 1.400 M², dirasa tidak adil dan dinyatakan batal serta surat-surat yang berisi pemberian hibah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pertimbangan, karena cucu-cucu pemberi hibah yang lain tidak mendapatkan bagian.

Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim tersebut, dinilai perlu untuk menganalisis secara hukum terlebih dahulu hibah sawah seluas 1.400 M² yang dilakukan Alm semasa hidupnya kepada T (Tergugat). Dalam perspektif hukum Islam, ada 3 (tiga) Rukun Hibah. *Pertama*, adanya *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan telah terjadi pemindahan hak milik dari seseorang yang menghibahkan kepada orang lain yang menerima hibah. Pemindahan hak milik tersebut ditandai dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian.

Kedua, ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Harta yang diserahkan benar-benar milik penghibah secara sempurna dan

penghibah harus merupakan orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.

Ketiga, ada harta yang akan dihibahkan dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain serta merupakan harta yang bermanfaat dan diakui agama. Dengan demikian, hibah tidak sah jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, bukan milik penghibah secara sempurna misalnya harta pinjaman dari orang lain, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama.

Peruntukan hibah dikecualikan terhadap beberapa orang berikut, dengan ketentuan¹¹:

1. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka hibah harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras tersebut
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

KHI mengatur secara khusus tentang hibah dalam Bab V tentang Hibah mulai dari Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Pasal 210 Ayat 1 KHI, yaitu pemberi hibah merupakan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan pada saat melakukan hibah. Pemberi hibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Ayat 2, yaitu harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
3. Pasal 211, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

¹¹Abdur Rahman I Doi, *Op.Cit.*, hal.202

4. Pasal 212, yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
5. Pasal 213, yaituhibah yang diberikan pada suatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
6. Pasal 214, yaitu Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Hibah tanah seluas 1.400 M² (A3) oleh Alm kepada Tergugat/Termohon Kasasi merupakan satu-satunya tanah dari enam bidang tanah yang merupakan barang sengketa dalam perkara *a quo* yang ditetapkan sebagai hibah yang sah oleh Majelis Hakim. Penilaian terhadap pertimbangan hakim tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis pembuktian kebenaran dalil masing-masing pihak, kemudian menganalisis berdasarkan ketentuan KHI.

Penggugat dalam posita mendalilkan bahwa Alm dalam keadaan sakit telah menghibahkan tanah A3 kepada Tergugat. Tergugat/ Termohon Kasasi dalam eksepsi juga membenarkan dan mempertegas bahwa telah terjadi hibah tanah A.3 dari Alm kepadanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 213 diatur bahwa hibah yang diberikan pada saat penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Alm saat menghibahkan tanah tersebut berada dalam keadaan sakit dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat/Termohon Kasasi untuk meminta persetujuan kepada Penggugat selaku ahli waris. Akan tetapi, hibah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Ayat 1 KHI dimana hibah seharusnya dilakukan di hadapan dua orang saksi. Hibah hanya dilakukan di hadapan Penggugat/ Pemohon Kasasi. Kesaksian X hanya menerangkan bahwa tanah A.3 digarap oleh Tergugat/Termohon Kasasi bukan menyaksikan sendiri hibah atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum bahwa telah terjadi hibah tanah A.3 oleh Alm kepada Tergugat/Termohon Kasasi dinilai tidak tepat secara hukum. Sehingga dapat pula diketahui bahwa

Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan ahli waris tunggal Alm yang berhak atas keseluruhan harta *tirkah* (harta peninggalan) Alm tanpa dikurangi dengan hibah tanah A.3 seluas 1.400 M² sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Harta warisan merupakan bagian dari harta *tirkah* (harta peninggalan). Pemisahan harta warisan dari harta *tirkah* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pelunasan kewajiban pewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 175 KHI yang berupa biaya pengurusan pemakaman jenazah pewaris, pelunasan hutang serta penyelesaian wasiat yang dibuat pewaris semasa hidup.
2. Penyelesaian pembagian harta *tirkah* (Harta Peninggalan) adalah dimulai dari melaksanakan kewajiban ahli waris dalam bentuk : *tajhiysh* jenazah, membayar hutang mayat, mengembalikan titipan orang pada pewaris dan melaksanakan wasiat. Setelah itu baru mengadakan pembahagian warisan menurut petunjuk alquran, sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ketentuan mengenai pembagian harta *tirkah* (harta peninggalan) telah diatur secara jelas di dalam Qur'an dalam Surat An Nisa 4 ayat 7,11,12,33 dan 176 dan surat lainnya yang tercantum dalam al-Quran, Sunnah serta Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim tentang pembagian harta *tirkah* dan hibah dalam kasus ini, dinilai telah sesuai dengan KHI, namun pertimbangan hukum hakim yang menetapkan N dan M sebagai anak angkat Pewaris tidak tepat.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 633/K/Ag/2013 adalah Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti merupakan anak kandung laki-laki satu-satunya Alm. Tergugat/Termohon Kasasi, B (janda Alm. Soehardjo), U, M dan N tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap harta *tirkah* (harta

peninggalan) Alm. Pertimbangan hakim yang menetapkan kedudukan Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan ahli waris tunggal Alm dinilai telah tepat. Demikian pula dengan hibah tanah A.3 seluas 1.400 M² oleh Alm. Soehardjo kepada Tergugat/Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 213 KHI karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa hibah dilakukan Alm saat dalam keadaan sakit, sehingga Tergugat/Termohon Kasasi tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan dari Penggugat yang merupakan ahli waris. Hibah sebagaimana didalilkan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 KHI karena tidak dilakukan di hadapan minimal dua orang saksi.

B. Saran.

1. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, khususnya para ahli waris untuk secara cermat dan jujur dalam memperhitungkan harta *tirkah* dan kewajiban pewaris, sehingga para ahli waris maupun pihak-pihak lainnya memperoleh bagian yang merupakan haknya. Bagi masyarakat secara khusus masyarakat yang memiliki harta yang besar nilainya, disarankan untuk memanfaatkan kewenangan yang dimiliki notaris dalam menginventarisir dan membuat akta autentik tentang pemisahan dan pembagian harta pewaris. Langkah tersebut dapat mencegah terjadinya sengketa dan apabila perselisihan tetap terjadi, maka langkah tersebut dapat mempermudah pembuktian di persidangan demi tercapainya keadilan bagi ahli waris.
2. Bagi ahli waris, untuk terlebih dahulu memahami makna atau hakikat diberikannya harta oleh Allah SWT yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dan sebagai perekat hubungan persaudaraan atau *ikhuwah Islamiyah* dan *Insaniyah*. Pemahaman yang mendalam tentang hakikat harta tersebut sebaiknya dilanjutkan dengan pembagian yang adil yaitu pembagian harta waris kepada ahli waris dengan porsi yang berdasarkan kepada ketentuan Qur'an.
3. Bagi Majelis Hakim untuk lebih cermat, tidak mengabaikan serta berhati-hati menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti, baik yang berupa bukti tertulis maupun kesaksian para saksi. Hakim

sebaiknya memahami secara mendalam, prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya hukum kewarisan Islam maupun prinsip hukum perkawinan, untuk kemudian menjadikan prinsip tersebut sebagai pedoman dalam memutus perkara dan menghasilkan putusan pembagian waris yang adil.

V. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Praditya Paramitha, Jakarta, 2005
- Rahman, Abdur I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Rasyid, Sulaiman, *Ilmu Fara'idh*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2003
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Thaib, M. Hasballah, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2012